CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN MAHASISWA DALAM MEMPERKUAT NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Imam Ahmad Rambe[1], M Fajri Assalam[2], M Isra Bimasatwika[3], Muhammad Riko[4]

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung[1]
imamahmadr@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung[2]
fajriass0909@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung[3]
bimasatwikaaa@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung[4]
m.riko00@gmail.com

Abstrak

Peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial kini mulai melemah di tengah meningkatnya sikap individualistis dan kurangnya kepedulian terhadap dinamika sosial. Kondisi ini berpengaruh pada minimnya kontribusi mahasiswa dalam menghadapi persoalan ekonomi rakyat, terutama pada persaingan antar-UMKM yang kian ketat dan memicu ketimpangan sosial. Artikel ini bertujuan meninjau kembali peranan mahasiswa dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Dengan pendekatan deskriptif-kritis dan kajian literatur dari pemikiran Mubyarto, Yudi Latif, dan Ahmad Syafii Maarif, artikel ini menekankan pentingnya revitalisasi peran mahasiswa sebagai penggerak solidaritas sosial dan pemberdayaan UMKM berbasis nilai gotong royong dan keadilan sosial.

Kata kunci: Mahasiswa, UMKM, Pancasila, Keadilan Sosial, Revitalisasi

Abstract

The role of university students as agents of social change has begun to weaken amid increasing individualism and declining concern for social dynamics. This situation affects their contribution in addressing economic challenges, particularly in the growing competition among micro, small, and medium enterprises (MSMEs), which often leads to social inequality. This article aims to re-examine the role of students in strengthening the values of Pancasila, especially the fifth principle: social justice for all Indonesian people. *Using a descriptive-critical approach and literature review based on the works of Mubyarto, Yudi Latif, and Ahmad Syafii Maarif, this study emphasizes the need to revitalize the student's role as a driver of social solidarity and MSME empowerment grounded in the values of mutual cooperation (*gotong royong*) and social justice.*

***Keywords**: Students, MSMEs, Pancasila, Social Justice, Revitalization*

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

I. PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan bagian dari kelompok intelektual muda yang memiliki peran strategis sebagai *agent of change* dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Dalam pandangan Daryono, mahasiswa idealnya menjadi warga negara yang demokratis dan berperan aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan serta keadilan sosial di tengah masyarakat.[1] Namun, pada era modern ini, peranan tersebut mulai mengalami pergeseran. Banyak mahasiswa lebih berfokus pada pencapaian akademik dan orientasi karier pribadi dibandingkan keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial yang terjadi di sekitarnya. Fenomena ini menandakan munculnya kecenderungan apatis terhadap dinamika sosial yang tengah dihadapi rakyat.

Salah satu dinamika sosial yang penting untuk diperhatikan adalah kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia.[2] Namun, dalam kenyataannya, persaingan antar pelaku UMKM yang semakin ketat sering kali menimbulkan ketimpangan ekonomi dan konflik sosial, khususnya dalam hal akses terhadap modal, pasar, dan teknologi digital. Boediono menyebut bahwa ketimpangan ekonomi yang tidak diimbangi dengan nilai moral dan sosial dapat memperlemah struktur ekonomi kerakyatan.[3] Akibatnya, nilai gotong royong sebagai salah satu cerminan Pancasila mulai memudar, tergantikan oleh pola pikir kompetitif yang individualistis.

Dalam situasi tersebut, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk kembali berperan sebagai penggerak kesadaran sosial dan ekonomi rakyat. Melalui revitalisasi peranannya, mahasiswa dapat berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*. Notonagoro menjelaskan bahwa keadilan sosial merupakan puncak dari keseluruhan nilai Pancasila yang berfungsi sebagai arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[4] Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menjadi insan akademis, tetapi juga harus tampil sebagai motor penggerak perubahan sosial yang menegakkan nilai keadilan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.[5]

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila?
2. Apa bentuk peran dan kontribusi mahasiswa dalam memperkuat nilai keadilan sosial di lingkungan kampus maupun masyarakat?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat mahasiswa dalam mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
4. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menginternalisasikan nilai keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?

III. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kepedulian dan peran sosial mahasiswa terhadap dinamika masyarakat.
2. Menjelaskan hubungan antara persaingan UMKM dan munculnya ketimpangan sosial dalam konteks ekonomi nasional.
3. Menggali dan menawarkan konsep revitalisasi peranan mahasiswa yang berbasis nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, guna mendorong tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IV. LANDASAN TEORI

1. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman moral bangsa Indonesia yang berfungsi mengarahkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaelan menjelaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi ideologi politik, tetapi juga menjadi pandangan hidup yang menyatukan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam satu kesatuan moral bangsa.[6] Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam perilaku individu dan kebijakan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Menurut Ahmad Syafii Maarif, pengamalan Pancasila menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan keadilan sosial yang berkeadaban.[7]

2. Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila

Keadilan sosial merupakan nilai puncak dalam hierarki sila-sila Pancasila yang menegaskan tujuan akhir kehidupan berbangsa, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Notonagoro menekankan bahwa keadilan sosial tidak hanya bermakna distribusi ekonomi, tetapi juga keseimbangan hak dan kewajiban antarwarga negara.[8] Yudi Latif juga menambahkan bahwa sila kelima merupakan landasan etis yang menuntun negara dan masyarakat untuk menciptakan struktur sosial yang manusiawi dan berkeadilan.[9] Dalam konteks ini, peranan mahasiswa menjadi relevan sebagai penggerak kesadaran keadilan sosial, terutama di tengah meningkatnya ketimpangan akibat persaingan ekonomi yang tidak seimbang.

3. Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Sosial

Mahasiswa memiliki fungsi strategis dalam membangun kesadaran sosial dan memperjuangkan nilai-nilai moral bangsa. Daryono menyebutkan bahwa mahasiswa adalah warga negara yang memiliki kemampuan kritis dan tanggung jawab untuk ikut serta membangun tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.[10] Sementara menurut BPIP, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus diarahkan untuk membentuk karakter mahasiswa agar memiliki kesadaran kebangsaan, empati sosial, serta keberanian moral untuk membela kepentingan rakyat.[11] Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya berperan dalam ruang akademik, tetapi juga dalam praktik sosial yang nyata.

V. PEMBAHASAN

5.1 Masalah Peranan Mahasiswa yang Mulai Acuh atas Dinamika Sosial

Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai elemen kritis bangsa yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial. Dalam konteks sejarah, mahasiswa sering kali berperan penting dalam berbagai gerakan moral dan politik yang membawa perubahan signifikan bagi bangsa Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, idealisme dan kepekaan sosial mahasiswa mulai mengalami penurunan. Fenomena ini terlihat dari menurunnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta meningkatnya orientasi pragmatis terhadap karier dan pencapaian individu.

Menurut Daryono, mahasiswa yang ideal adalah mereka yang memiliki kesadaran kritis terhadap kondisi sosial dan memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan.[12] Akan tetapi, modernisasi dan arus globalisasi membawa dampak perubahan nilai di kalangan mahasiswa, di mana solidaritas sosial sering kali tergantikan oleh budaya kompetitif dan individualistik. Akibatnya, mahasiswa cenderung kurang peka terhadap persoalan sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk terhadap pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dalam perekonomian rakyat.

Lestari dan Siregar menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan dalam perspektif Pancasila menekankan pentingnya empati sosial dan gotong royong sebagai dasar hubungan antarmanusia.[13] Ketika mahasiswa mulai kehilangan kepekaan sosial tersebut, maka semangat kemanusiaan dan persatuan yang menjadi dasar ideologi bangsa ikut tergerus. Kondisi ini

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga, yaitu *Kemanusiaan yang adil dan beradab* serta *Persatuan Indonesia*.

Selain itu, lembaga pendidikan tinggi sering kali terlalu menekankan aspek akademik dan kompetensi profesional, tanpa menumbuhkan secara seimbang kesadaran sosial mahasiswa. Padahal, menurut BPIP, pendidikan Pancasila seharusnya menjadi instrumen utama dalam membentuk karakter mahasiswa yang berjiwa nasionalis, beretika sosial, dan berkeadilan.[14] Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi peran mahasiswa melalui pendekatan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual — bukan sekadar teori, tetapi diimplementasikan dalam tindakan nyata seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM, atau gerakan sosial berbasis nilai gotong royong.

Revitalisasi tersebut penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi kaum intelektual pasif, melainkan agen perubahan yang mampu berkontribusi nyata dalam memperkuat tatanan sosial-ekonomi bangsa. Dengan menghidupkan kembali nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kebersamaan, mahasiswa dapat mengambil kembali perannya sebagai penjaga moral bangsa dan penggerak utama keadilan sosial di masyarakat.

5.2 Persaingan UMKM yang Memicu Konflik Sosial dalam Lingkup UMKM

Persaingan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin meningkat seiring berkembangnya ekonomi digital dan keterbukaan pasar global. Menurut Boediono, struktur ekonomi nasional yang didominasi oleh UMKM menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan akses terhadap modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang adil. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menimbulkan gesekan sosial antar-pelaku usaha yang sebelumnya menjunjung tinggi nilai solidaritas dan gotong royong sebagai ciri khas ekonomi rakyat Indonesia.[15]

Mubyarto menegaskan bahwa ekonomi Pancasila harus berlandaskan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[16] Namun dalam praktiknya, persaingan UMKM saat ini cenderung mengikuti pola ekonomi kapitalistik yang individualistik, di mana pelaku usaha lebih berfokus pada peningkatan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak sosial di sekitarnya. Pergeseran ini menunjukkan terkikisnya nilai gotong royong yang dahulu menjadi landasan etika ekonomi masyarakat Indonesia. Akibatnya, muncul potensi konflik sosial, seperti persaingan harga yang tidak sehat, perebutan pasar, hingga menurunnya rasa solidaritas antar-pelaku UMKM di wilayah yang sama.

Selain faktor ekonomi, rendahnya literasi dan kesadaran sosial pelaku UMKM juga menjadi penyebab lemahnya solidaritas. Dwiyanto menilai bahwa lemahnya pemahaman terhadap prinsip good governance dan keadilan sosial dalam sektor ekonomi rakyat turut memperbesar kesenjangan sosial antar pelaku usaha.[17] Ketimpangan ini semakin nyata ketika sebagian UMKM berhasil menguasai pasar digital, sementara sebagian lainnya tertinggal karena keterbatasan literasi teknologi dan akses informasi.

Untuk itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai persatuan dan gotong royong, menjadi penting dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih kolaboratif. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong perubahan paradigma dari kompetisi destruktif menuju kolaborasi produktif. Melalui kegiatan pendampingan, penelitian sosial, dan inovasi kewirausahaan sosial, mahasiswa dapat menjembatani dunia akademik dan ekonomi rakyat, sekaligus memperkuat cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Notonagoro dan Yudi Latif.[18]

5.3. Keadilan Sosial yang Tak Kunjung Tercapai atas Dinamika Tersebut

Keadilan sosial yang menjadi cita-cita sila kelima Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam realitas ekonomi nasional, terutama di sektor UMKM. Ketimpangan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar menyebabkan sebagian pelaku usaha kecil sulit berkembang dan tertinggal dibanding kelompok yang lebih kuat.[19] Kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif belum berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Notonagoro, keadilan sosial dalam Pancasila mencakup keadilan distributif, yaitu pembagian hasil pembangunan yang proporsional sesuai kontribusi dan kebutuhan masyarakat.[20] Namun, sistem ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan tanpa pemerataan justru memperbesar kesenjangan sosial. Yudi Latif menegaskan bahwa ketimpangan tersebut melemahkan solidaritas sosial dan mengikis semangat gotong royong sebagai basis moral bangsa.

Boediono juga menyebut bahwa orientasi ekonomi yang terlalu fokus pada pertumbuhan angka makro sering kali mengabaikan nilai pemerataan dan kesejahteraan sosial.[21] Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan sosial perlu disertai kesadaran kolektif untuk menghidupkan kembali nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang menumbuhkan kesadaran kritis dan mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Triyanto menyebut mahasiswa sebagai agen moral yang wajib menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat.[22]

Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya menjadi gagasan normatif, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata—khususnya melalui peran aktif mahasiswa dalam membangun sistem ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

5.4 Revitalisasi Peranan Mahasiswa

Mahasiswa memiliki peranan penting sebagai agen perubahan dan penggerak sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam dinamika saat ini, idealisme mahasiswa cenderung melemah karena orientasi pragmatis terhadap karier dan kehidupan pribadi. Revitalisasi peran mahasiswa menjadi krusial untuk mengembalikan semangat sosial dan tanggung jawab moral mereka terhadap masyarakat.[23]

Menurut Daryono, mahasiswa harus berfungsi sebagai agen demokrasi dan penggerak perubahan sosial melalui kesadaran kritis serta partisipasi aktif dalam memecahkan persoalan rakyat.[24] Dalam konteks ekonomi rakyat, mahasiswa dapat menjadi pendamping UMKM, fasilitator literasi ekonomi, serta inovator dalam kewirausahaan sosial. Kegiatan tersebut bukan hanya bentuk pengabdian, tetapi juga upaya konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat sila kelima Pancasila.

Siti Zuhro menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan Pancasila di kalangan mahasiswa penting agar nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan nyata.[25] Melalui kegiatan kolaboratif berbasis kampus—seperti pendampingan UMKM, penelitian terapan, dan pemberdayaan masyarakat—mahasiswa dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan sosial ekonomi rakyat.

Susanto menambahkan bahwa aktualisasi Pancasila di era globalisasi harus diwujudkan dalam tindakan konkret yang adaptif terhadap perubahan zaman.[26] Revitalisasi peran mahasiswa berarti mengembalikan orientasi perjuangan mereka kepada kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan individual. Mahasiswa perlu berperan sebagai agen moral dan intelektual yang memperkuat solidaritas sosial, menegakkan nilai keadilan, serta menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, revitalisasi peranan mahasiswa bukan hanya langkah akademis, tetapi juga strategi ideologis untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam praktik sosial dan ekonomi bangsa.

5.5 Implementasi Nilai Pancasila dalam Kolaborasi Mahasiswa dan UMKM

Revitalisasi peranan mahasiswa tidak akan bermakna tanpa penerapan nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Implementasi ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara mahasiswa dan pelaku UMKM dalam bentuk pendampingan, riset

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terapan, serta inovasi sosial-ekonomi berbasis masyarakat. Kolaborasi tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan persatuan Indonesia, dua nilai utama yang menjadi fondasi dalam membangun keadilan sosial.[27]

Menurut Ahmad Syafii Maarif, Pancasila bukan sekadar ideologi formal, tetapi harus menjadi pedoman moral yang hidup dalam tindakan dan kebijakan nyata.[28] Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan UMKM harus dilandasi oleh etika sosial yang menghargai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas ekonomi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar agar kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha tidak bersifat eksploitatif, melainkan saling menguatkan.

BPIP (2020) menegaskan bahwa aktualisasi nilai Pancasila di era modern menuntut partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan integritas sosial.[29] Melalui kegiatan seperti *community service learning*, *sociopreneurship*, dan pelatihan manajemen berbasis nilai Pancasila, mahasiswa dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi nilai Pancasila dalam kolaborasi mahasiswa dan UMKM bukan hanya upaya pemberdayaan ekonomi, tetapi juga bentuk aktualisasi ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Revitalisasi peranan mahasiswa merupakan kunci dalam menghidupkan kembali semangat sosial dan moral bangsa di tengah meningkatnya persaingan ekonomi, khususnya dalam sektor UMKM. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai insan akademik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik nyata kehidupan masyarakat.

Persaingan antar-UMKM yang kian tajam telah memunculkan ketimpangan sosial dan melemahkan solidaritas ekonomi rakyat. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan peran aktif mahasiswa dalam mendorong kolaborasi, pendampingan, dan inovasi sosial berbasis nilai gotong royong serta persatuan Indonesia. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dapat menjadi penggerak perubahan menuju sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan ekonomi, tetapi memerlukan kesadaran moral kolektif dan keterlibatan aktif generasi muda. Mahasiswa harus menjadi katalis dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, sehingga cita-cita "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata.

B. SARAN

Mahasiswa perlu memperkuat kembali peran sosialnya melalui kegiatan nyata yang mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama sektor UMKM. Bentuk konkret dapat berupa program pendampingan, riset kolaboratif, pelatihan literasi digital, dan pengembangan kewirausahaan sosial. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga aktor aktif dalam mewujudkan keadilan sosial berbasis nilai Pancasila.

Institusi pendidikan tinggi hendaknya memperluas kurikulum dan program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Integrasi antara akademik dan praktik sosial perlu diperkuat agar mahasiswa memiliki ruang aktualisasi untuk mengimplementasikan idealisme dan tanggung jawab sosialnya.

Pemerintah perlu menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung sinergi antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM, khususnya dalam bidang pelatihan, akses teknologi, dan penguatan modal sosial. Sementara itu, masyarakat diharapkan membuka ruang

kolaborasi dengan generasi muda untuk menciptakan harmoni sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Boediono. (2015). *Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Kompas.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). *Buku Saku Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP RI.

Daryono. (2010). *Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta: Kencana.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasan, Zainudin. (2025). *Pancasila dan kewarnegaraan*. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Zainudin. (2024). *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila*. Journal Ilmiah Mahasiswa.

Hasan, Zainudin. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Journal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik

Latif, Y. (2015). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Lestari, I., & Siregar, M. (2020). Nilai Kemanusiaan dalam Perspektif Pancasila: Relevansi untuk Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, 10*(2), 188–196.

Mubyarto. (1999). *Ekonomi Pancasila: Pemikiran Ekonomi Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: LP3ES.

Notonagoro. (1997). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantja Simpati.

Setiadi, E., & Hidayat, D. R. (2017). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Bandung: Refika Aditama.

Susanto, E. (2020). Aktualisasi Pancasila di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21*(2), 174–190.

Triyanto. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana.

Wahyuni, E. T. (2020). *Model Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Reflektif*. Bandung: Alfabeta.

Zuhro, S. (2015). Revitalisasi Pendidikan Pancasila. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, 17*(2), 237–246.

Setiadi, E., & Hidayat, D. R. (2017). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Bandung: Refika Aditama.

Sultoni, M. (2019). *Penguatan Nilai Pancasila dalam Kurikulum 2013*. Bandung: Widina Media Utama.